



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 160/PMK.07/2016  
TENTANG  
PEDOMAN UMUM DAN RINCIAN DANA  
PROYEK PEMERINTAH DAERAH DAN DESENTRALISASI  
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 telah ditetapkan Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, rincian Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi menurut Provinsi/Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Umum dan Rincian Dana Proyek Pemerintah Daerah

dan Desentralisasi Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5907);
2. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 153);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 477);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN UMUM DAN RINCIAN DANA PROYEK PEMERINTAH DAERAH DAN DESENTRALISASI MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/ KOTA TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi yang selanjutnya disebut Dana P2D2 adalah dana yang bersumber dari APBN dan dialokasikan sebagai insentif kepada daerah provinsi, kabupaten, dan kota daerah percontohan Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan

tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

#### Pasal 2

- (1) Daerah penerima Dana P2D2 Tahun Anggaran 2016 merupakan daerah yang direkomendasikan layak untuk memperoleh Dana P2D2 berdasarkan hasil verifikasi keluaran DAK Tahun Anggaran 2015 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- (2) Verifikasi keluaran DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses verifikasi atas output atas pelaksanaan DAK bidang infrastruktur di Daerah Percontohan Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi yang meliputi:
  - a. bidang infrastruktur jalan;
  - b. bidang infrastruktur irigasi;
  - c. bidang infrastruktur air minum; dan
  - d. bidang infrastruktur sanitasi.
- (3) Verifikasi keluaran DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perjanjian Verifikasi antara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Bank Dunia tanggal 20 Desember 2010 sebagaimana telah diubah pada tanggal 13 Februari 2013.



### Pasal 3

- (1) Dana P2D2 Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp199.313.187.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan miliar tiga ratus tiga belas juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
- (2) Rincian daerah penerima Dana P2D2 Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menurut provinsi/kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Pasal 4

- (1) Penyaluran Dana P2D2 Tahun Anggaran 2016 dilakukan sekaligus dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Penyaluran Dana P2D2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Peraturan Menteri ini diundangkan.

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menganggarkan Dana P2D2 Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sebagai pendapatan daerah dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah telah melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 maka penyesuaian Dana P2D2 ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran atas Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 maka penyesuaian Dana P2D2 ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran atas APBD Tahun Anggaran 2016.

*N*

- (4) Pemerintah Daerah menyampaikan pemberitahuan atas penyesuaian Dana P2D2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Pimpinan DPRD.
- (5) Pemerintah Daerah mencatat penyesuaian Dana P2D2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2016.

#### Pasal 6

- (1) Penggunaan Dana P2D2 Tahun Anggaran 2016 ditujukan untuk mendukung kegiatan nonfisik di bidang infrastruktur jalan, infrastruktur irigasi, infrastruktur air minum, dan infrastruktur sanitasi.
- (2) Kegiatan nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan perencanaan, pengendalian, dan pengawasan, yang merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan fisik, berdasarkan azas efisiensi, efektivitas dan kepatutan.

#### Pasal 7

Pengawasan atas pelaksanaan Dana P2D2 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Oktober 2016

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Oktober 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1597

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum

u.b.  
Kepala Bagian T.O. Kementerian



ARIF BINTARTO YUWONO  
NIP 197109121997031001



LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 160/PMK.07/2016  
TENTANG  
PEDOMAN UMUM DAN RINCIAN DANA PROYEK PEMERINTAH  
DAERAH DAN DESENTRALISASI TAHUN ANGGARAN 2016

RINCIAN DANA PROYEK PEMERINTAH DAERAH DAN DESENTRALISASI  
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2016

(dalam ribu rupiah)

NO.	NAMA DAERAH	BIDANG INFRASTRUKTUR				JUMLAH DANA P2D2 T.A 2016
		AIR MINUM	IRIGASI	JALAN	SANITASI	
<b>A</b>	<b>Wilayah Provinsi Jambi</b>					
1	Provinsi Jambi	-	1.155.561	1.697.918	-	2.853.479
2	Kab. Sarolangun	16.508	19.557	257.558	85.813	379.436
3	Kab. Bungo	192.403	-	1.137.020	152.906	1.482.329
4	Kab. Kerinci	176.160	126.870	667.511	190.327	1.160.868
5	Kab. Merangin	215.010	168.500	834.681	132.662	1.350.853
6	Kab. Muaro Jambi	104.285	51.505	231.476	43.204	430.470
7	Kab. Tanjung Jabung Timur	-	479.455	616.638	-	1.096.093
8	Kab. Tebo	120.782	125.704	736.870	59.963	1.043.319
9	Kota Jambi	311.385	-	-	-	311.385
10	Kota Sungai Penuh	91.374	154.095	414.641	46.580	706.690
<b>B</b>	<b>Wilayah Provinsi Bengkulu</b>					
1	Provinsi Bengkulu	-	541.064	1.953.976	-	2.495.040
2	Kab. Mukomuko	87.326	125.168	362.381	59.518	634.393
3	Kab. Lebong	47.863	104.638	466.942	-	619.443
4	Kab. Bengkulu Tengah	104.929	92.592	497.498	121.168	816.187
5	Kota Bengkulu	3.361	37.053	137.803	17.103	195.320
<b>C</b>	<b>Wilayah Provinsi Lampung</b>					
1	Provinsi Lampung	-	878.619	2.688.234	-	3.566.853
2	Kab. Lampung Barat	286.187	571.191	1.498.916	308.502	2.664.796
3	Kab. Lampung Selatan	88.729	419.672	524.620	113.008	1.146.029
4	Kab. Lampung Timur	41.456	17.757	413.545	38.342	511.100
5	Kab. Tulang Bawang	78.366	148.778	191.893	153.277	572.314
6	Kab. Way Kanan	176.979	192.957	1.769.770	135.980	2.275.686
7	Kota Metro	-	-	124.021	32.798	156.819
8	Kab. Pringsewu	104.951	175.044	290.728	118.562	689.285
9	Kab. Mesuji	58.727	109.951	456.479	127.897	753.054
<b>D</b>	<b>Wilayah Provinsi Jawa Barat</b>					
1	Kab. Bandung	680.050	705.191	-	-	1.385.241
2	Kab. Ciamis	102.786	510.070	569.006	61.716	1.243.578
3	Kab. Garut	215.980	282.059	-	98.826	596.865
4	Kab. Indramayu	326.300	-	-	-	326.300
5	Kab. Karawang	19.583	-	1.638.409	-	1.657.992
6	Kab. Majalengka	347.327	-	-	-	347.327
7	Kab. Subang	161.485	88.905	-	-	250.390
8	Kab. Sukabumi	183.771	228.097	313.711	107.613	833.192
9	Kab. Sumedang	190.190	63.842	-	-	254.032

NO.	NAMA DAERAH	BIDANG INFRASTRUKTUR				JUMLAH DANA P2D2 T.A 2016
		AIR MINUM	IRIGASI	JALAN	SANITASI	
10	Kab. Tasikmalaya	481.034	571.631	965.025	-	2.017.690
11	Kota Sukabumi	-	116.046	217.237	159.314	492.597
12	Kota Tasikmalaya	19.911	70.313	103.971	-	194.195
<b>E</b>	<b>Wilayah Provinsi Jawa Tengah</b>					
1	Kab. Banjarnegara	34.999	224.017	358.726	-	617.742
2	Kab. Banyumas	-	315.052	-	-	315.052
3	Kab. Batang	166.748	429.720	482.126	-	1.078.594
4	Kab. Blora	-	301.997	878.246	178.337	1.358.580
5	Kab. Boyolali	248.850	309.653	537.380	-	1.095.883
6	Kab. Brebes	548.764	110.050	-	-	658.814
7	Kab. Cilacap	-	466.494	800.925	-	1.267.419
8	Kab. Demak	330.090	88.441	802.307	-	1.220.838
9	Kab. Jepara	285.084	-	580.668	244.518	1.110.270
10	Kab. Karanganyar	198.707	57.124	830.831	-	1.086.662
11	Kab. Kebumen	129.876	215.073	673.537	-	1.018.486
12	Kab. Kendal	272.812	59.118	511.410	-	843.340
13	Kab. Kudus	-	298.515	724.844	-	1.023.359
14	Kab. Magelang	-	586.314	-	-	586.314
15	Kab. Pati	314.194	84.218	-	-	398.412
16	Kab. Pekalongan	208.903	126.388	603.494	-	938.785
17	Kab. Pemalang	84.846	-	293.830	-	378.676
18	Kab. Purbalingga	214.259	366.786	575.539	143.533	1.300.117
19	Kab. Purworejo	179.778	431.325	148.118	-	759.221
20	Kab. Semarang	-	647.220	-	-	647.220
21	Kab. Sukoharjo	-	-	514.935	86.971	601.906
22	Kab. Tegal	272.731	114.960	-	-	387.691
23	Kab. Wonogiri	-	421.093	657.719	-	1.078.812
24	Kota Pekalongan	103.905	-	312.408	-	416.313
25	Kota Salatiga	-	94.615	733.618	17.358	845.591
26	Kota Tegal	123.091	129.478	248.798	-	501.367
<b>F</b>	<b>Wilayah Provinsi Jawa Timur</b>					
1	Provinsi Jawa Timur	-	707.394	-	-	707.394
2	Kab. Bangkalan	-	102.463	544.477	256.966	903.906
3	Kab. Banyuwangi	329.051	436.793	-	-	765.844
4	Kab. Blitar	247.301	524.669	607.755	193.188	1.572.913
5	Kab. Bondowoso	285.839	91.318	757.599	161.786	1.296.542
6	Kab. Gresik	404.593	-	-	-	404.593
7	Kab. Jember	109.445	38.959	656.050	-	804.454
8	Kab. Jombang	214.983	527.455	-	-	742.438
9	Kab. Kediri	237.619	344.604	-	-	582.223
10	Kab. Lamongan	181.663	489.058	-	-	670.721
11	Kab. Lumajang	213.449	442.337	630.620	216.265	1.502.671
12	Kab. Madiun	219.684	357.154	492.773	-	1.069.611
13	Kab. Magetan	139.632	146.573	628.241	105.588	1.020.034
14	Kab. Malang	506.174	860.087	927.067	-	2.293.328
15	Kab. Mojokerto	-	311.541	-	-	311.541
16	Kab. Nganjuk	229.044	465.304	-	-	694.348
17	Kab. Ngawi	198.294	719.711	950.793	201.516	2.070.314
18	Kab. Pacitan	238.569	297.541	439.602	-	975.712



NO.	NAMA DAERAH	BIDANG INFRASTRUKTUR				JUMLAH DANA P2D2 T.A 2016
		AIR MINUM	IRIGASI	JALAN	SANITASI	
19	Kab. Pamekasan	-	-	489.757	101.694	591.451
20	Kab. Pasuruan	296.254	497.485	-	229.000	1.022.739
21	Kab. Ponorogo	250.435	217.668	504.103	136.581	1.108.787
22	Kab. Probolinggo	113.635	608.248	-	-	721.883
23	Kab. Sampang	160.567	255.641	517.442	160.318	1.093.968
24	Kab. Sidoarjo	417.187	-	-	-	417.187
25	Kab. Situbondo	301.938	380.446	1.027.459	-	1.709.843
26	Kab. Sumenep	65.003	92.829	700.607	87.575	946.014
27	Kab. Trenggalek	-	421.576	704.160	-	1.125.736
28	Kab. Tuban	356.299	389.641	-	-	745.940
29	Kab. Tulungagung	214.797	379.998	1.204.147	207.546	2.006.488
30	Kota Blitar	91.719	-	431.778	-	523.497
31	Kota Kediri	-	134.535	304.586	-	439.121
32	Kota Madiun	-	-	386.389	-	386.389
33	Kota Mojokerto	-	-	55.707	7.316	63.023
34	Kota Pasuruan	106.170	175.552	30.773	-	312.495
35	Kota Probolinggo	-	-	457.117	-	457.117
36	Kota Batu	103.330	225.801	323.667	-	652.798
<b>G</b>	<b>Wilayah Provinsi Kalimantan Barat</b>					
1	Provinsi Kalimantan Barat	-	2.477.188	2.914.762	-	5.391.950
2	Kab. Bengkayang	-	87.858	164.099	62.014	313.971
3	Kab. Landak	211.259	638.074	656.212	146.884	1.652.429
4	Kab. Kapuas Hulu	-	-	1.632.757	156.594	1.789.351
5	Kab. Mempawah	109.154	23.790	366.740	-	499.684
6	Kab. Sintang	74.444	228.124	132.732	52.918	488.218
7	Kota Singkawang	154.721	12.393	349.177	77.212	593.503
8	Kab. Sekadau	112.903	-	192.266	150.855	456.024
9	Kab. Kayong Utara	-	139.894	471.155	56.393	667.442
10	Kab. Kubu Raya	136.755	186.282	358.287	-	681.324
<b>H</b>	<b>Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah</b>					
1	Provinsi Kalimantan Tengah	-	1.848.989	2.515.835	-	4.364.824
2	Kab. Barito Selatan	163.715	112.572	1.102.473	194.459	1.573.219
3	Kab. Barito Utara	155.179	237.399	473.606	176.970	1.043.154
4	Kab. Kapuas	-	962.770	746.032	-	1.708.802
5	Kab. Kotawaringin Barat	-	-	1.084.865	-	1.084.865
6	Kab. Kotawaringin Timur	-	668.235	1.918.967	208.877	2.796.079
7	Kab. Barito Timur	156.573	277.739	728.348	49.884	1.212.544
8	Kab. Pulang Pisau	150.583	759.394	1.047.020	131.908	2.088.905
9	Kab. Gunung Mas	91.775	147.802	954.112	176.892	1.370.581
10	Kab. Lamandau	29.859	56.393	248.711	22.621	357.584
11	Kab. Sukamara	36.118	253.838	303.115	40.885	633.956
12	Kab. Katingan	10.187	444.115	797.145	-	1.251.447
13	Kota Palangka Raya	42.550	263.908	970.158	101.879	1.378.495
<b>I</b>	<b>Wilayah Provinsi Sulawesi Utara</b>					
1	Provinsi Sulawesi Utara	-	1.596.405	1.388.869	-	2.985.274
2	Kab. Bolaang Mongondow	151.586	404.662	528.662	120.490	1.205.400
3	Kab. Minahasa	139.214	187.958	713.564	-	1.040.736
4	Kota Bitung	121.302	155.570	424.743	-	701.615
5	Kota Manado	-	100.954	555.418	120.381	776.753

NO.	NAMA DAERAH	BIDANG INFRASTRUKTUR				JUMLAH DANA P2D2 T.A 2016
		AIR MINUM	IRIGASI	JALAN	SANITASI	
6	Kota Tomohon	22.107	212.056	540.673	46.152	820.988
7	Kab. Minahasa Utara	163.168	274.958	262.337	-	700.463
8	Kab. Bolaang Mongondow Utara	116.889	14.118	371.768	223.608	726.383
9	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	130.517	-	491.136	-	621.653
10	Kab. Minahasa Tenggara	58.872	-	342.485	39.638	440.995
11	Kab. Bolaang Mongondow Timur	152.960	-	259.075	-	412.035
12	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	50.436	238.354	484.595	-	773.385
13	Kab. Kepulauan Sangihe	95.357	213.685	512.350	-	821.392
<b>J</b>	<b>Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan</b>					
1	Provinsi Sulawesi Selatan	-	2.900.468	1.892.361	-	4.792.829
2	Kab. Bantaeng	156.086	33.378	612.062	137.528	939.054
3	Kab. Barru	127.936	311.141	675.108	188.692	1.302.877
4	Kab. Bone	-	188.222	1.542.988	119.380	1.850.590
5	Kab. Bulukumba	-	689.623	1.076.614	156.890	1.923.127
6	Kab. Enrekang	-	-	542.784	189.654	732.438
7	Kab. Jeneponto	-	140.165	278.953	105.526	524.644
8	Kab. Luwu	-	358.086	2.194.209	198.947	2.751.242
9	Kab. Maros	176.264	277.947	855.986	99.530	1.409.727
10	Kab. Pangkajene Kepulauan	260.785	184.594	936.426	172.570	1.554.375
11	Kab. Pinrang	-	146.592	324.152	44.955	515.699
12	Kab. Kepulauan Selayar	138.327	128.408	770.280	137.963	1.174.978
13	Kab. Sidenreng Rappang	45.460	319.336	813.881	-	1.178.677
14	Kab. Soppeng	109.655	293.198	953.475	-	1.356.328
15	Kab. Tana Toraja	-	20.792	456.392	31.039	508.223
16	Kab. Wajo	175.981	378.383	1.164.523	-	1.718.887
17	Kota Parepare	118.127	140.022	486.281	127.640	872.070
18	Kota Palopo	104.890	209.113	588.231	-	902.234
19	Kab. Toraja Utara	-	149.974	84.832	53.385	288.191
<b>K</b>	<b>Wilayah Provinsi Sulawesi Barat</b>					
1	Provinsi Sulawesi Barat	-	-	2.449.468	-	2.449.468
2	Kab. Majene	82.408	186.129	253.825	182.425	704.787
3	Kab. Mamuju	192.984	334.158	749.017	218.559	1.494.718
4	Kab. Polewali Mandar	169.414	184.291	439.135	244.479	1.037.319
5	Kab. Mamasa	176.478	278.559	625.278	246.915	1.327.230
6	Kab. Mamuju Utara	104.434	226.671	1.594.739	-	1.925.844
<b>L</b>	<b>Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat</b>					
1	Kab. Bima	-	274.297	171.084	-	445.381
2	Kab. Lombok Barat	256.539	90.194	639.739	117.509	1.103.981
3	Kab. Lombok Timur	70.501	234.809	604.587	133.536	1.043.433
4	Kab. Sumbawa	22.592	111.793	541.381	-	675.766
5	Kota Mataram	-	97.960	324.372	56.232	478.564
6	Kota Bima	14.427	-	93.548	-	107.975
7	Kab. Sumbawa Barat	18.915	31.448	278.501	-	328.864
8	Kab. Lombok Utara	131.855	137.442	119.038	48.750	437.085
<b>M</b>	<b>Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur</b>					
1	Provinsi Nusa Tenggara Timur	-	1.400.651	1.682.838	-	3.083.489
2	Kab. Kupang	-	348.309	353.718	-	702.027
3	Kab. Lembata	106.353	109.140	-	-	215.493
4	Kab. Ngada	110.102	182.057	509.271	-	801.430

NO.	NAMA DAERAH	BIDANG INFRASTRUKTUR				JUMLAH DANA P2D2 T.A 2016
		AIR MINUM	IRIGASI	JALAN	SANITASI	
5	Kab. Sikka	88.931	182.820	116.826	-	388.577
6	Kab. Sumba Barat	-	121.674	674.112	-	795.786
7	Kab. Sumba Timur	157.088	229.024	672.336	17.731	1.076.179
8	Kab. Timor Tengah Selatan	-	122.424	226.686	-	349.110
9	Kota Kupang	179.841	192.019	611.366	-	983.226
10	Kab. Rote Ndao	46.024	340.932	627.640	-	1.014.596
11	Kab. Manggarai Barat	-	712.556	432.300	-	1.144.856
12	Kab. Nagekeo	-	-	814.956	-	814.956
13	Kab. Manggarai Timur	147.248	177.701	397.951	-	722.900
14	Kab. Malaka	130.552	244.006	371.162	92.321	838.041
N	Wilayah Provinsi Maluku Utara					
1	Provinsi Maluku Utara	-	2.711.126	928.355	-	3.639.481
2	Kab. Halmahera Tengah	3.820	-	203.894	-	207.714
3	Kab. Halmahera Barat	-	27.234	168.872	31.658	227.764
4	Kota Ternate	179.023	-	700.651	-	879.674
5	Kab. Halmahera Timur	13.392	236.289	451.802	181.322	882.805
6	Kota Tidore Kepulauan	134.601	153.115	559.235	172.167	1.019.118
7	Kab. Kepulauan Sula	96.710	372.648	850.013	214.919	1.534.290
8	Kab. Halmahera Selatan	43.570	113.754	351.952	42.310	551.586
9	Kab. Halmahera Utara	9.181	-	165.151	16.888	191.220
10	Kab. Pulau Morotai	-	14.258	171.078	22.338	207.674
JUMLAH TOTAL		21.924.186	55.126.324	111.000.270	11.262.407	199.313.187

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Kepala Bagian T.U. Kementerian

  
ARIF BINTARTO YUWONO  
NIP 197109121997031001